PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA LEBIH BAYAR DAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (LK BA-BUN 999.05 TA 2012-2016)

Deni Herdiyana, S.E., M.M., M.Acc.Fin.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

ABSTRACT: *This study aims to find out whether recognition, recording, summarizing and reporting of receivables (LB) and obligations (KB) Sharing Revenue Fund - Natural Resources (DBH SDA) is in accordance with the applicable source documents and Government Accounting Standards (SAP) through a descriptive analysis approach. The results of the study can be concluded that there is a transition period on the basis of accounting in recording LB and KB DBH SDA, namely the transition from the Cash Toward Accrual (CTA) basis to the Accrual basis. And also there is a transfer of accounting principles in the recognition and recording of LB and KB DBH SDA, namely from the principle of substance over form to the principle of formality. In addition, it is known that the payment period for LB DBH SDA is faster than payment for KB DBH SDA.*

Keywords: *Receivables (LB), Obligations (KB), Sharing Revenue Fund - Natural Resources (DBH SDA), Government Accounting Standards (SAP), substance over form, the Cash Toward Accrual (CTA) basis, the Accrual basis*

PENDAHULUAN

Reformasi dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan mulai berlaku sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), DJPK sebagai entitas pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD) yang merupakan entitas akuntansi dan pelaporan keuangan di bawah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) yang menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang nantinya akan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setelah digabung dengan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).

Dalam rangka pelaksanaan BA BUN 999.05 terkait Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Menteri Keuangan menetapkan DJPK sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimana salah satu tugasnya adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN 999.05. Oleh karena itu, diperlukan adanya Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disusun secara periodik yaitu semesteran dan tahunan yang mengacu pada PMK Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Adapun di tahun 2015, setiap entitas pemerintahan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sudah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintahan berbasis akrual. Pemerintah menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap yang dimulai dari SAP berbasis kas menuju akrual (CTA) kemudian menjadi SAP berbasis akrual. Oleh

karena itu, dalam penyajiannya terdapat penambahan Laporan Keuangan yaitu Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang sebelumnya hanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Secara periodik dalam penyajian LKTD, terdapat pengakuan atas Lebih Bayar dan Kurang Bayar Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil khususnya terkait dengan Sumber Daya Alam. Pengakuan dan pencatatan Lebih Bayar dan Kurang Bayar mulai TA 2015 mengacu pada PMK Nomor 263/PMK.05/2014 yang merupakan pengganti dari PMK 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang berbasis Kas menuju Akruwal. Oleh karena itu, penulis akan mengolah dan menganalisa terkait pengakuan dan penyajian Lebih Bayar dan Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam dari periode TA 2012 sampai dengan Semester I TA 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Reformasi pengelolaan keuangan negara mulai dijalankan semenjak ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan Negara tersebut, perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Perubahan sistem akuntansi Pemerintah

1. *Single entry* menjadi *double entry*
Pada mulanya pencatatan akuntansi disektor pemerintahan dengan menggunakan sistem pencatatan *single entry*. Tetapi system *single*

entry dirasakan memiliki banyak kekurangan, sehingga sistem pencatatan beralih ke sistem *double entry*. Dalam sistem *double entry*, setiap transaksi keuangan akan dicatat sebanyak dua kali, yaitu dicatat dalam sisi debit dan sisi kredit. Sistem ini juga dikenal dengan sistem pembukuan berpasangan.

2. Perubahan basis pencatatan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual.
Basis pencatatan dalam akuntansi pemerintahan pada awalnya menggunakan basis kas. Kemudian basis kas ini diubah menjadi basis akrual. Dalam mengantisipasi perubahan basis kas menjadi basis akrual ini, digunakanlah basis kas menuju akrual (*cash basis toward accrual*). Basis kas menuju akrual ini sebuah jalan tengah dalam mengantisipasi perubahan sistem pencatatan akuntansi. Dengan menggunakan basis tersebut diharapkan dapat mempermudah pencatatan akuntansi pada saat periode transisi menuju basis akrual penuh. Dan secara teknis pencatatan basis ini akan dipermudah dengan menggunakan jurnal korolari.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Dalam SAP ini, pengakuan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, sedangkan pengakuan terhadap aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP ini mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual. Sedangkan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan adalah APBN/APBD. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan operasional, laporan perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan

laporan perubahan ekuitas. Dilihat dari jenis laporan keuangan yang dihasilkan, terdapat perbedaan antara SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Dalam SAP berbasis akrual, entitas pelaporan diwajibkan untuk menerbitkan laporan tambahan yaitu laporan operasional, laporan perubahan SAL dan Laporan perubahan ekuitas.

Berdasarkan PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan dimana besaran nominalnya diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban transfer dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek karena realisasi pembayarannya dari RKUN ke RKUD dilakukan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Definisi Akuntansi Piutang berdasarkan PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan) adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang tersebut merupakan aset lancar yang akan dilakukan pembayaran melalui mekanisme pemotongan realisasi transfer / setoran tunai dari Pemda ke RKUN.

PMK 120/PMK.05/2009

Sebelum tahun 2015, Pemerintah Pusat dalam hal ini DJPK menyajikan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah berbasis CTA masih mengacu kepada PMK 120/PMK.05/2009. Berdasarkan peraturan tersebut, DJPK mengakui dua piutang/kewajiban yang terdiri dari diestimasi dan pihak ketiga. Adapun perbedaan antara diestimasi dan pihak ketiga tidak secara eksplisit dijelaskan dalam PMK Nomor 120/PMK.05/2009, tetapi pengakuan dan penyajian atas piutang dan kewajiban tersebut pada LKTD periode 2012-2014 adalah sebagai berikut:

a. Piutang/Kewajiban Diestimasi

Piutang/kewajiban diestimasi diakui pada saat terdapat selisih antara besaran nominal DBH Sumber Daya Alam yang telah ditransfer ke daerah kabupaten/kota dengan besaran realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagikan untuk

periode yang sama, dimana jumlahnya masih akumulatif dan belum teridentifikasi hak / kewajiban dari masing-masing daerah provinsi / kabupaten/kota tersebut.

b. Piutang/Kewajiban Pihak Ketiga

Pencatatan piutang/kewajiban pihak ketiga dilakukan ketika terdapat selisih antara besaran nominal DBH Sumber Daya Alam yang telah ditransfer ke daerah dengan bagi hasil dari besaran realisasi PNBP yang masuk ke RKUN pada tahun yang sama, dimana besaran hak/kewajiban dari masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota telah teridentifikasi.

PMK 263/PMK.05/2014

Mulai tahun 2015, DJPK sebagai salah satu entitas akuntansi dan pelaporan keuangan telah menerapkan basis akrual dalam menyajikan laporan keuangan. Adapun pengelolaan dan penyajian piutang/kewajiban khususnya DBH SDA diatur berdasarkan PMK Nomor 263/PMK.05/2014.

Pengakuan dan penyajian piutang/kewajiban DBH SDA yang sebelumnya menerapkan prinsip *substance over form* beralih menerapkan legalitas yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang terdiri dari PMK/Perdirjen mengenai Lebih Bayar/Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam. Pengakuan dan penyajian besaran nominal mengenai piutang dan kewajiban transfer ke daerah DBH Sumber Daya Alam dijelaskan di bawah ini secara terinci sebagai berikut:

a. Piutang Pihak Ketiga

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 263/PMK.05/2013, Piutang yang timbul atas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai lebih bayar transfer.

b. Piutang Diestimasi

Mengacu pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) PMK Nomor 263/PMK.05/2013, Piutang Diestimasi diakui pada saat

bagianpendapatan yang telah diterima rekening kas negara lebihkecil dari yang telah dibagihasilkan seluruhnya namunbelum diketahui jumlah hak negara yang harusdikembalikan dari masing-masing daerah penerimaberdasarkan hasil perhitungan dan rekonsiliasi yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasilperhitungan dan rekonsiliasi. Namun demikian, berdasarkan rekomendasi BPK terkait LKTD TA 2015 bahwa piutang diestimasi diakui apabila belum terbit PMK mengenai lebih bayar transfer walaupun hak Negara dari masing-masing daerah penerima sudah teridentifikasi dengan akurat dan andal melalui perhitungan dan rekonsiliasi.

c. Kewajiban Pihak Ketiga

Pasal 11 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 263/PMK.05/2013 menyatakan bahwa Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada saatditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenaikurang bayar transfer dan diukur sebesar nilai nominal sesuaidengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurangbayar transfer.

d. Kewajiban Diestimasi

Kewajiban Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Diestimasi diakui pada saat bagian pendapatan yang telah diterimarekening kas negara belum dibagihasilkan seluruhnyakarena belum diketahui jumlah hak masing-masing daerahpenerima berdasarkan hasil perhitungan dan rekonsiliasi serta diukur sebesar nilai nominal sesuai denganhasil perhitungan dan rekonsiliasi. Namun demikian, berdasarkan rekomendasi BPK terkait LKTD TA 2015 bahwa Kewajiban diakui sebagai diestimasi apabila belum terbit PMK mengenai kurang bayar transfer walaupun kewajiban Negara kepada masing-masing daerah penerima sudah teridentifikasi dengan akurat dan andal melalui perhitungan dan rekonsiliasi.

Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer ke Daerah Berbasis Akrua

Berdasarkan bultek nomor 21, piutang transfer pada entitas pemberi dalam hal ini DJPK diakui karena terdapat Lebih Bayar kepada entitas penerima transfer, piutang tersebut dicatat

pada saat diketahui telah terjadi Lebih Bayar sebesar nilai nominalnya. Apabila jumlah dan daerah yang mengalami Lebih Bayar tersebut dapat dipastikan dan diidentifikasi tiap-tiap daerahnya, nilai Lebih Bayar dicatat sebagai piutang Lebih Bayar sesuai dengan jenis transfer dan dirinci per daerahnya. Akan tetapi apabila tiap-tiap daerah yang mengalami Lebih Bayar tersebut belum teridentifikasi, maka Lebih Bayar dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi.

Sedangkan utang transfer yang diakui oleh entitas pemerintah pusat dalam hal ini DJPK yaitu pada saat terdapat hak entitas penerima (Pemda Provinsi/Kabupaten/kota) yang belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Utang transfer dimaksud dibuatkan daftar daerah penerima disertaidengan nilainya masing-masing, dan dijelaskan secara rinci terkait jenis dan tahun timbulnya utang tersebut pada CaLK. Apabila utang transfer tersebut belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah provinsi/kabupaten/kota, maka secara akumulasi utang transfer diakui sebagai utang diestimasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Piutang Pihak Ketiga

Pengakuan piutang pihak ketiga periode TA 2012-2014 berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.05/2009 dimana pengungkapan dan pengakuan piutang mengacu pada prinsip *substance over form*. Oleh karena itu, pencatatan piutang tersebut lebih ditekankan pada kertas kerja hasil rekonsiliasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dimana hak negara dari masing-masing daerah penerima telah teridentifikasi tanpa menunggu terbitnya PMK/Perdirjen mengenai Lebih bayar DBH Sumber Daya Alam. Sedangkan mulai TA 2015 dengan menerapkan basis akrual, pengakuan piutang DBH SDA berdasarkan pada PMK Nomor 263/PMK.05/2014 sebagai pengganti dari PMK Nomor 120/PMK.05/2009 yang menegaskan bahwa piutang pihak ketiga diakui pada saat terbitnya PMK/Perdirjen mengenai Lebih Bayar walaupun sebelumnya telah diketahui hak negara dari masing-masing daerah penerima melalui rekonsiliasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

Pencatatan piutang pihak ketiga biasanya didahului dengan reklasifikasi dari piutang diestimasi, sehingga piutang diestimasi mengalami penurunan sedangkan piutang pihak ketiga mengalami peningkatan. Besaran piutang diestimasi yang mengalami reklasifikasi tidak akan selalu sama dengan piutang pihak ketiga, hal tersebut dikarenakan penetapan rincian per daerah pada PMK/Perdirjen mengenai Lebih Bayar DBH SDA secara akumulatif dapat berbeda dengan pengakuan Lebih Bayar DBH SDA diestimasi hasil rekonsiliasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

Pembayaran atas piutang pihak ketiga sebelum TA 2015 melalui mekanisme pemotongan realisasi transfer ke daerah dan setoran Pemda ke RKUN, sedangkan pembayaran atas piutang tersebut mulai TA 2015 hanya melalui mekanisme pemotongan realisasi transfer ke daerah yang diatur berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2014. Adapun periode pembayaran piutang atas Lebih Bayar Realisasi Transfer ke Daerah khususnya terkait DBH Sumber Daya Alam periode TA 2012 sampai dengan Semester I TA 2016 (Terlampir Tabel 1.)

Berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran Piutang Lebih Bayar DBH SDA, periode pembayaran paling lama Lebih Bayar DBH SDA adalah Pertambangan Umum Royalty TA 2013 yaitu diakui pada periode TA 2013 sebesar Rp15,20 miliar kemudian berangsur-angsur menurun menjadi sebesar Rp328,13 juta pada TA 2014 karena terdapat pelunasan oleh masing-masing daerah penerima manfaat tersebut apakah melalui mekanisme pemotongan realisasi transfer/penyetoran melalui RKUN, selanjutnya terdapat pembayaran untuk LB Pertambangan Umum Royalty TA 2013 sehingga menjadi nihil pada Semester I TA 2015. Namun demikian, terdapat pengakuan kembali atas piutang dengan jenis transfer yang sama pada Semester II TA 2015 sebesar Rp5,72 miliar yang kemudian dilakukan pembayaran pada Semester I TA 2016 melalui mekanisme pemotongan realisasi transfer sehingga besarnya menjadi nihil. Adapun Lebih Bayar DBH SDA yang durasi pembayarannya tidak lebih dari satu tahun yaitu Gas Bumi TA 2012, Gas Bumi Otsus TA 2015, Pertum Iuran Tetap TA 2012, Kehutanan IHPH

TA 2012 dan Kehutanan DR TA 2012. Besaran nilai dari masing-masing lebih bayar transfer ke daerah khususnya DBH SDA yang disertai dengan jangka waktu pembayaran (Terlampir pada tabel 2).

Piutang Diestimasi

Nilai Piutang diestimasi DBH SDA diperoleh dari penghitungan selisih kurang antara besaran nilai DBH Sumber Daya Alam yang dihitung berdasarkan data prognosa/realisasi PNPB yang dibagihasilkan dengan realisasi transfer DBH SDA yang telah disalurkan sampai dengan triwulan IV, nilai tersebut diperoleh dari rekonsiliasi antara DJPK dengan kementerian/lembaga teknis terkait sebelum ditetapkan dengan PMK/Perdirjen mengenai Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam. (Terlampir dalam tabel 3) Piutang Lebih Bayar TKDD Diestimasi menjelaskan lamanya periode pengakuan LB DBH SDA Diestimasi untuk masing-masing jenis DBH SDA sebelum direklas menjadi Piutang yang sudah firm yaitu Piutang Pihak Ketiga/PNPB yang ditandai dengan terbitnya peraturan mengenai alokasi kurang bayar. Rata-rata lamanya pengakuan LB DBH SDA Diestimasi adalah 6 bulan - 1 tahun, hal tersebut mengindikasikan bahwa terbitnya PMK/Perdirjen mengenai Lebih Bayar tidak membutuhkan waktu yang lama setelah adanya pengakuan LB Diestimasi tersebut.

Berdasarkan Nota Dinas Kasubdit DBH SDA Nomor ND-39/PK22/2015 tanggal 23 Februari 2015, pada penyusunan LKTD TA 2014 *Audited* terdapat pencatatan LB DBH SDA Diestimasi sebesar Rp4.040,74 miliar. Angka tersebut merupakan hasil penghitungan melalui rekonsiliasi dimana daerah yang mengalami Lebih Bayar belum teridentifikasi, karena terdapat PNPB yang masuk ke RKUN di akhir tahun anggaran yang harus dibagihasilkan tetapi jumlahnya masih akumulatif belum di-breakdown per daerah. Pada penyusunan LKTD TA 2015 terdapat reklasifikasi dari LB DBH SDA Diestimasi menjadi LB DBH SDA yang sudah firm/pihak ketiga yang mengacu pada PMK Nomor 259/PMK.07/2015 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2013 dan TA 2014 dimana masing-masing daerah

penerima sudah teridentifikasi, sehingga nilai LB DBH SDA Diestimasi sebesar Rp4.040,74 miliar menjadi nihil, akan tetapi terdapat penambahan LB DBH SDA Diestimasi sebesar Rp3,31 triliun di TA 2015 berdasarkan S-85/PK.2/2016 dan diakui sampai dengan Semester I TA 2016 (Terlampir table 4). Adapun pencatatan Piutang LB DBH SDA Diestimasi periode TA 2012 – Semester I TA 2016 secara terinci tercantum pada (Terlampir Tabel 5)

Kurang Bayar Pihak Ketiga

Kurang Bayar Pihak Ketiga DBH SDA dengan nama lain Kewajiban TKD (Transfer ke Daerah) merupakan suatu utang yang sudah firm yang diakui oleh Pemerintah Pusat (DJPK selaku PA BA BUN 999.05) kepada Pemerintah Daerah dimana hak dari masing-masing daerah penerima telah teridentifikasi. Di sini terdapat perbedaan dalam pengaturan mengenai pengakuan kurang bayar untuk DBH SDA yaitu periode akuntansi sebelum penerapan basis akrual dan setelah basis akrual.

Sebelum menerapkan basis akrual yaitu periode TA 2012-2014, pengakuan Kurang Bayar Pihak Ketiga DBH SDA mengacu kepada PMK Nomor 120/PMK.07/2009 dimana pengakuan nilai kurang bayar tersebut mengacu pada prinsip *substance over form* yaitu nilai tersebut diakui dan dicatat berdasarkan pada kertas kerja hasil rekonsiliasi dimana besaran hak dari masing-masing daerah penerima telah teridentifikasi dengan andal tanpa menunggu penetapan peraturan mengenai alokasi kurang bayar. Sedangkan mulai TA 2015 setelah penerapan basis akrual, pengakuan dan pencatatan kurang bayar DBH SDA mengacu pada PMK Nomor 263/PMK.05/2014 dimana pengakuan dan pencatatan kurang bayar DBH SDA dilakukan pada saat terbitnya peraturan mengenai alokasi kurang bayar walaupun sebelumnya telah diketahui hak dari masing-masing daerah penerima melalui rekonsiliasi.

Durasi penyelesaian kurang bayar DBH SDA oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah penerima dari periode TA 2012 sampai dengan Semester I TA 2016. Angka 1 – 6 pada garis vertikal suatu tabel menjelaskan mengenai periode waktu per enam bulan dalam penyelesaian pembayaran kewajiban (Terlampir

pada Tabel 7). Pada table 7 tersebut, KB DBH PSDH TA 2006-2012 dan KB DBH DR TA 2007-2012 memiliki durasi paling lama dalam penyelesaian pembayaran kewajiban yaitu dua tahun enam bulan, pembayaran tersebut secara bertahap (terlampir pada grafik 1)

Pembayaran Kewajiban DBH PSDH dan DBH DR (terlampir grafik 1) menjelaskan mengenai pembayaran dua kewajiban DBH Kehutanan yang terdiri dari PSDH dan Dana Reboisasi selama kurun waktu 2 tahun 6 bulan. Kewajiban untuk DBH PSDH dan DBH DR pertama kali diakui pada TA 2012 masing-masing sebesar Rp9,56 miliar dan Rp13,89 miliar sesuai dengan Nota Dinas Kasubdit DBH SDA Nomor:ND-43/PK2.2/2013 perihal Penyampaian Bahan Masukan Penyusunan LKTD TA 2012 dan pengakuan dengan jumlah yang sama sampai dengan Semester I TA 2013. Pada Semester II TA 2013, DBH DR mengalami penurunan menjadi Rp12,55 miliar sedangkan DBH PSDH mengalami peningkatan menjadi Rp14,54 miliar. Kemudian di Semester I TA 2014 mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar Rp223,5 juta dan Rp307,13 juta untuk DBH PSDH dan DBH DR, dimana angka tersebut tidak berubah sampai dengan Semester II TA 2014 kecuali untuk DBH DR berubah menjadi Rp306,65 juta. Adapun pelunasan untuk kewajiban tersebut dilakukan pada Semester I TA 2015, sehingga pencatatan kewajiban tersebut menjadi nihil pada Neraca LKTD Semester I TA 2015.

Adapun lamanya periode pelunasan untuk pembayaran kewajiban yang ditetapkan sebelum tahun 2015, disebabkan pengakuan kewajiban tersebut dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar untuk pengalokasian pada APBN. Sedangkan penetapan PMK Kurang Bayar tersebut memerlukan waktu diantaranya adalah menunggu penetapan LKPP Audited untuk menghitung selisih antara penerimaan PNPB pada SAKUN yang akan dibagihasilkan dengan alokasi DBH SDA yang telah ditransfer untuk periode yang sama. Setelah alokasi kurang bayar tersebut diakomodir ke dalam APBN yang ditandai dengan penetapan Peraturan Presiden tentang alokasi transfer, selanjutnya akan

dibuatkan SKPRTD sebagai dasar pembuatan SPP dan SPM pada Subdit Transfer ke Daerah sebelum dikirim ke KPPN Jakarta II selaku SAKUN sebagai syarat untuk penerbitan SP2D untuk mentransfer kurang bayar DBH SDA dari RKUN ke RKUD.

Rincian periode pembayaran Kurang Bayar DBH SDA Pihak Ketiga secara lengkap untuk periode waktu TA 2012 – Semester I TA 2016 dijelaskan pada tabel 8. Besaran nilai kewajiban pihak ketiga ini biasanya berasal dari kewajiban diestimasi yang direklas ketika sudah terbit peraturan mengenai alokasi kurang bayar mulai TA 2015, sedangkan tahun sebelumnya tidak memperhatikan peraturan mengenai alokasi kurang bayar tetapi lebih memperhatikan perhitungan hasil rekonsiliasi dimana hak dari masing-masing daerah penerima telah teridentifikasi.

Kurang Bayar Diestimasi

Terdapat perbedaan dalam pengakuan Kurang Bayar Diestimasi atas DBH Sumber Daya Alam yaitu sebelum TA 2015 yang masih menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual (CTA) dan mulai TA 2015 yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pengakuan dan pencatatan kewajiban diestimasi sebelum TA 2015 adalah dihitung berdasarkan selisih antara porsi bagi hasil penerimaan PNPB yang masuk ke RKUN dengan realisasi transfer sampai dengan triwulan IV, angka tersebut masih bersifat akumulatif dimana masing-masing daerah penerima belum dapat diidentifikasi. Sedangkan mulai TA 2015, kewajiban diestimasi diakui pada saat peraturan mengenai alokasi kurang bayar belum ditetapkan tetapi besaran angkanya sudah diketahui yaitu melalui rekonsiliasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait apakah hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota sudah teridentifikasi atau belum.

Kewajiban yang diestimasi (Terlampir pada tabel 8) menjelaskan lamanya pengakuan kewajiban diestimasi sebelum direklas menjadi kewajiban yang sudah firm (pihak ketiga), angka vertikal pada tabel menunjukkan durasi lamanya pengakuan kewajiban diestimasi sedangkan nomenklatur horizontal pada tabel mengindikasikan jenis kurang bayar transfer ke

daerah. Dari tabel tersebut terdapat pengakuan kewajiban diestimasi selama empat tahun yaitu KB DBH Iuran Tetap TA 2012, KB DBH Royalti TA 2012, KB DBH Dana Reboisasi TA 2012, KB DBH PSDH TA 2012, dan KB DBH IIUPH/IHPH TA 2012. Adapun kewajiban diestimasi untuk DBH Pertum TA 2013 dan DBH Kehutanan TA 2013 diakui selama tiga tahun, sedangkan sisanya adalah rata-rata 6 bulan – 1 tahun pengakuan atas kewajiban diestimasi sebelum reklasifikasi.

Perbandingan antara kewajiban diestimasi DBH Pertambangan Umum TA 2012 dan kewajiban diestimasi DBH Pertambangan Umum TA 2013 dari TA 2012 sampai dengan Semester I TA 2016. (Terlampir pada grafik 2). Berdasarkan Trend Pencatatan KB DBH Pertum Diestimasi TA 2012 – Semester I TA 2016, mulai TA 2012 terdapat pengakuan KB Diestimasi DBH Pertum TA 2012 sebesar Rp1,3 triliun, kemudian ada penurunan pada TA 2013 menjadi Rp 215,19 miliar, selanjutnya nilai tersebut berkurang menjadi Rp175,57 miliar pada Semester I TA 2014 dan bertahan sampai dengan Semester I TA 2016. Sama halnya dengan KB Diestimasi DBH Pertum TA 2013 yang pengakuannya mulai TA 2013 sebesar Rp3,15 triliun, kemudian mengalami penurunan pada Semester I TA 2014 menjadi sebesar Rp171,73 miliar dan bertahan sampai dengan Semester I TA 2016. Angka tersebut hampir sama dengan KB Diestimasi DBH Pertum TA 2012.

Perbandingan antara kewajiban diestimasi DBH Kehutanan TA 2012 dan kewajiban diestimasi DBH Kehutanan TA 2013 dari TA 2012 sampai dengan Semester I TA 2016 (Terlampir pada grafik 3). Berdasarkan Trend Pencatatan KB DBH Kehutanan Diestimasi TA 2012 – Semester I TA 2016 pada grafik 3, mulai TA 2012 terdapat pengakuan KB Diestimasi DBH Kehutanan TA 2012 sebesar Rp145,71 miliar, kemudian ada penurunan pada Semester II TA 2013 menjadi Rp 21,89 miliar, selanjutnya nilai tersebut berkurang menjadi Rp19,60 miliar pada Semester II TA 2014 dan bertahan sampai dengan Semester I TA 2016.

Berbeda dengan KB Diestimasi DBH Kehutanan TA 2013 yang pengakuannya mulai TA 2013 sebesar Rp43 miliar, kemudian

mengalami penurunan pada Semester I TA 2014 menjadi sebesar Rp33,41 miliar, tetapi selanjutnya ada kenaikan menjadi sebesar Rp103,75 miliar pada TA 2014 dan bertahan sampai dengan Semester I TA 2016. Kenaikan pada pengakuan kewajiban diestimasi merupakan sesuatu yang tidak lazim karena biasanya selalu menurun dikarenakan adanya reklasifikasi dengan terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai alokasi kurang bayar.

Penyelesaian KB Diestimasi yang berlarut-larut kemungkinan dikarenakan sulitnya untuk mengidentifikasi hak dari masing-masing daerah kabupaten/kota, lebih lanjut aplikasi simponi belum digunakan secara optimal sehingga belum bisa membantu untuk mengidentifikasi besaran hak dari masing-masing daerah penghasil PNPB.

Pengakuan kewajiban diestimasi pada TA 2014 *Audited* untuk DBH Kehutanan, Panas Bumi dan Pertambangan Umum yang kemudian direklas menjadi kewajiban pihak ketiga selama TA 2015. Nilai kewajiban diestimasi untuk kehutanan dan panas bumi menjadi nihil di Semester I TA 2015 sedangkan pertambangan umum royalty menjadi nihil di Semester II TA 2015 (terlampir pada table 9).

Keseluruhan pengakuan kewajiban diestimasi untuk DBH SDA periode 2012 – Semester I TA 2016. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penyelesaian kewajiban diestimasi memakan waktu yang cukup lama, hal tersebut dikarenakan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah penerima yang tersebar di wilayah Indonesia secara akurat dan andal baik melalui rekonsiliasi dengan daerah kabupaten/kota/provinsi penghasil maupun dengan kementerian/teknis terkait. Selain itu, aplikasi simponi belum bisa digunakan secara optimal oleh *stakeholders* terutama para penyeter PNPB (terlampir pada table 10).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pencatatan Lebih Bayar dan Kurang Bayar mengenai DBH Sumber Daya Alam mengalami masa periode transisi yaitu periode sebelum TA 2015 yang masih menerapkan basis Kas Menuju Akrua

periode TA 2015 ke atas yang telah menerapkan basis Akrua.

2. Basis Kas Menuju Akrua mengacu pada PMK Nomor 120/PMK.05/2009 dimana pencatatannya lebih menekankan pada prinsip *Substance over Form* sedangkan basis Akrua mengacu pada PMK Nomor 263/PMK.05/2014 dimana pencatatannya lebih menekankan pada legalitas peraturan perundang-undangan.
3. Periode pembayaran untuk Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran atas Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam. Hal tersebut dikarenakan identifikasi untuk Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam per daerah provinsi/kabupaten/kota lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan identifikasi per daerah untuk Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam. Lamanya pembayaran kurang bayar DBH SDA ini karena Pemerintah harus menganggarkannya terlebih dahulu pada APBN Tahun Anggaran berikutnya. Selain itu, pengalokasian lebih bayar DBH SDA cukup menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sedangkan kurang bayar DBH SDA harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang membutuhkan waktu yang lebih lama.

Saran

1. Pengakuan dan penyajian Lebih Bayar dan Kurang Bayar mengenai DBH Sumber Daya Alam seyogyanya berjenjang mulai dari UAKPA BUN yaitu Subdit Alokator kemudian diverifikasi dan dicatat pada UAPA BUN dalam hal ini adalah Subdit Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah. Selain itu, perlu adanya buku pembantu piutang dan kewajiban yang bersumber dari dokumen yang valid untuk mengontrol perubahan dari piutang dan kewajiban tersebut sehingga menghasilkan nilai yang akurat dan andal.
2. Untuk mengurangi perbedaan angka antara SAU dengan SAI, perlu dilakukan rekonsiliasi data secara rutin dan intensif antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kementerian teknis terkait sebelum

- dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan sebaiknya data yang diperiksa oleh BPK tersebut adalah data hasil rekonsiliasi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kementerian Teknis terkait sehingga perbedaan selisih antara SAU dan SAI dapat diminimilisir.
3. Terdapat perbedaan timeline terkait *closed* data antara SAI dengan SAU, sehingga angka yang disampaikan berbeda. Sebaiknya cut off atas timeline SAU dan SAI dilakukan secara bersamaan, sehingga angka yang disampaikan pada saat pemeriksaan BPK menjadi sama.
 4. Kementerian Keuangan sebaiknya terlibat aktif dalam memfasilitasi rekonsiliasi data terkait dengan DBH SDA antara Kementerian Teknis dengan daerah. Saat ini Kemenkeu dalam hal ini Subdit DBH tidak pernah melakukan rekonsiliasi maupun memfasilitasi rekonsiliasi data dengan Kementerian Teknis dan Daerah, Kemenkeu hanya menerima data bersih dari Kementerian Teknis. Sehingga data yang diterima dari Kementerian teknis keakuratannya tidak optimal.
 5. Untuk mengurangi jumlah Lebih Bayar maupun Kurang Bayar, sebaiknya penyaluran DBH SDA triwulan III dan IV berdasarkan realisasi. Saat ini penyaluran DBH SDA yang berdasarkan realisasi hanya untuk triwulan IV saja, sedangkan penyaluran tahap I sd. III berdasarkan pagu alokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 6. Perlu adanya optimalisasi dalam penggunaan aplikasi simponi dalam rangka mempermudah pengidentifikasian daerah-daerah penerima DBH Sumber Daya Alam sehingga peraturan mengenai alokasi kurang bayar dapat segera ditetapkan.
 7. Perlu dilakukan sosialisasi Simponi yang intensif kepada setiap stakeholder sehingga memudahkan para stakeholder dalam melakukan penyetoran ke kas negara.
 8. Agar stakeholder dalam setiap melakukan setoran ke kas negara selalu menyampaikan bukti setor nya kepada Dinas Pendapatan Daerah, dan bukti setor ini dipakai oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar

perhitungan pada saat melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
PMK Nomor 120/PMK.07/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang berbasis Kas menuju Akrua;
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
PMK Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah;
PMK Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer ke Daerah Berbasis Akrua.
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa *Audited* TA 2012
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa *Audited* TA 2013
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa *Audited* TA 2014
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa *Audited* TA 2015
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa *Audited* TA 2016

LB DBH Perikanan TA 2014	-	-	-	-	-	18.941.545.236	18.941.545.236	-
TOTAL	25.801.194.589	2.300.000.000	73.275.522.841	61.985.233.619	328.126.130	2.566.224.466.116	4.196.285.243.954	1.169.469.193.771

Tabel 3 Piutang Lebih Bayar TKDD Diestimasi

Tabel 4 Pengakuan Piutang LB DBH SDA Diestimasi

Jenis Piutang Diestimasi	Semester I TA 2016	TA 2015	TA 2014	TA 2013
LB DBH Minyak Bumi	-	-	22.297.950.900	-
LB DBH Gas Bumi	-	-	661.363.345.100	-
LB DBH Landrent	-	-	311.062.107.530	-
LB DBH Royalti	-	-	2.321.429.698.549	-
LB DBH IIUPH/IHPH	-	-	34.853.452.106	-
LB DBH PSDH	-	-	456.352.085.518	-
LB DBH Dana Reboisasi	-	-	230.817.226.237	-
LB DBH Panas Bumi	-	-	2.564.619.132	-
LB DBH SDA TA 2015	3.305.688.896.638	3.305.688.896.638	-	-
Total	3.305.688.896.638	3.305.688.896.638	4.040.740.485.072	0

Tabel 5 Kertas Kerja Pencatatan Piutang Lebih Bayar DBH SDA Diestimasi Periode TA 2012-Semester I 2016

Jenis Transfer DBH Diestimasi	LKTD TA 2012	LKTD TA 2013	LKTD TA 2014	LKTD TA 2015	LKTD Smt I TA 2016
LB DBH Minyak Bumi TA 2012	833.088.425.476	-	-	-	-
LB DBH Minyak Bumi TA 2014	-	-	22.297.950.900	-	-
LB DBH Gas Bumi TA 2012	1.719.846.917.304	-	-	-	-
LB DBH Gas Bumi TA 2014	-	-	661.363.345.100	-	-

LB DBH Kehutanan - IHPH TA 2012	59.040.728.688	-	-	-	-
LB DBH Kehutanan - IHPH TA 2014	-	-	34.853.452.106	-	-
LB DBH Kehutanan - PSDH TA 2014	-	-	456.352.085.518	-	-
LB DBH Kehutanan - DR TA 2014	-	-	230.817.226.237	-	-
LB DBH Pertum - Landrent TA 2014	-	-	311.062.107.530	-	-
LB DBH Pertum - Royalty TA 2014	-	-	2.321.429.698.549	-	-
LB DBH Panas Bumi TA 2012	10.536.184.625	-	-	-	-
LB DBH Panas Bumi TA 2014	-	-	2.564.619.132	-	-
LB DBH SDA TA 2015	-	-	-	3.305.688.896.638	3.305.688.896.638
	2.622.512.256.093	-	4.040.740.485.072	3.305.688.896.638	3.305.688.896.638

Tabel 6 Kewajiban TKDD

Grafik 1 Pembayaran Kewajiban DBH PSDH dan DBH DR

Tabel 7 Kertas Kerja Periode Pembayaran Kewajiban TKDD

Jenis Transfer	LKTD TA 2012	LKTD Smt I TA 2013	LKTD TA 2013	LKTD Smt I TA 2014	LKTD TA 2014	LKTD Smt I TA 2015	LKTD TA 2015	LKTD Smt I TA 2016
KB DBH Minyak Bumi TA 2012	357,460,66 9,187	357,460,66 9,187	357,460,669, 187	-	-	-	-	-
KB DBH Minyak Bumi TA 2013	-	-	6,481,707,55 1,896	6,481,707,55 1,896	4,367,227,05 4,896	-	-	-
KB DBH Gas Bumi TA 2013	-	-	6,484,175,55 1,215	6,484,175,55 1,215	4,604,434,01 8,215	-	-	-
KB DBH Iuran Tetap TA 2008-2011	857,305,63 5	857,305,63 5	32,812,516,6 36	21,454,372,7 08	-	-	-	-
KB DBH Iuran Tetap TA 2013	-	-	15,082,747,6 82	123,932,017, 429	95,758,880,8 33	-	-	-
KB DBH Royalti TA 2008-2012	187,897,97 8,643	187,897,97 8,643	891,733,871, 546	59,971,197,2 44	-	-	-	-
KB DBH Royalti Ta 2013	-	-	349,720,523, 029	2,937,257,29 2,617	2,257,731,06 5,464	-	-	-
KB DBH Pabum TA 2012	-	-	3,383,475,48 8	475,488	-	-	-	-
KB DBH Pabum TA 2013	-	-	251,514,582, 221	251,514,582, 221	251,514,582, 221	-	-	-
KB DBH IIUPH/IHPH TA 2011-2012	3,509,146,5 90	3,509,146,5 90	19,883,181,5 89	181,589	-	-	-	-
KB DBH IIUPH Tahun 2012	-	-	1,764,000,00 0	1,764,000,00 0	1,764,000,00 0	-	-	-
KB DBH PSDH TA 2006-2012	9,562,847,4 03	9,562,847,4 03	14,538,730,5 06	223,493,663	223,493,663	-	-	-
KB DBH DR TA 2007-2012	13,890,366, 706	13,890,366, 706	12,554,486,7 98	307,134,866	306,648,068	-	-	-
KB DBH Kehutanan IIUPH TA 2013	-	-	-	-	47,746,333,6 13	-	-	-
KB DBH Kehutanan PSDH TA 2013	-	-	-	-	115,933,371, 598	-	-	-
KB DBH Kehutanan DR TA 2013	-	-	-	-	168,396,247, 141	-	-	-
KB DBH Kehutanan TA 2013	-	-	322,483,113, 858	331,908,178, 532	-	-	-	-
KB DBH IIUPH TA 2010	-	-	-	-	2,835,000,00 0	-	-	-
KB DBH PSDH TA 2011	-	-	-	-	1,621,434	-	-	-
KB DBH Perikanan TA 2013	-	-	31,161,370,0 00	31,161,370,0 00	31,161,370,0 00	-	-	-
KB DBH Minyak Bumi TA 2014	-	-	-	-	-	377,327,898, 179	377,327,914,787	-
KB DBH Gas Bumi TA 2014	-	-	-	-	-	3,885,140,01 7,247	3,885,140,000,000	-
KB DBH Kehutanan IIUPH TA 2014	-	-	-	-	-	89,432,853,3 43	89,432,853,343	89,432,853,343
KB DBH Kehutanan PSDH TA 2014	-	-	-	-	-	24,041,896,0 32	24,041,896,032	24,041,896,032
KB DBH Kehutanan DR TA 2014	-	-	-	-	-	91,560,073,0 41	91,560,073,041	91,560,073,041
KB DBH Pabum Iuran Tetap TA 2014	-	-	-	-	-	6,755,274,74 5	6,755,274,745	6,755,274,745
KB DBH Pabum Existing TA 2014	-	-	-	-	-	148,092,521, 286	148,092,521,286	148,092,521,286
KB DBH Pertum Iuran Tetap TA 2014	-	-	-	-	-	-	148,382,641,461	148,382,641,461
KB DBH Pertum TA 2013	-	-	-	-	-	-	5,723,151,786	5,723,151,786
KB DBH Pertum Royalty TA 2014	-	-	-	-	-	-	1,688,153,723,146	1,688,153,723,146
TOTAL	573,178,31 4,164	573,178,31 4,164	15,269,976,3 71,651	16,725,377,3 99,468	11,945,033,6 87,146	4,622,350,53 3,873	6,464,610,049,627	2,202,142,134,840

Tabel 8 Kewajiban Diestimasi

Grafik 2 Trend Pencatatan KB DBH Pertum Diestimasi TA 2012 – Semester I TA 2016

Grafik 3 Trend Pencatatan KB DBH Kehutanan Diestimasi TA 2012 – Semester I TA 2016

Tabel 9 Kewajiban Diestimasi yang Direklas Periode TA 2014 – 2015

Kode Akun	Uraian	2014 (Audited)	Semester I TA 2015	TA 2015 (Audited)
6125 11	DBH SDA Kehutanan KB IIUPH TA 2014	29,259, 004,509	-	-
	DBH SDA Panas Bumi			

6124	KB Iuran Tetap	7,873,2		
11	TA 2014	77,179	-	-
6124		148,092		
12	KB Eksisting TA	,521,28		
	2014	6	-	-
	DBH SDA			
	Pertambahan			
	Umum			
6123	KB Royalty TA	307,435	307,43	
12	2014	,693	5,693	
		185,532		
		,238,66	307,43	
		7	5,693	-

Tabel 10 Kertas Kerja Periode Pembayaran Kewajiban Diestimasi DBH SDA

Jenis Transfer	LKTD TA 2012	LKTD Smt ITA 2013	LKTD TA 2013	LKTD Smt ITA 2014	LKTD TA 2014	LKTD Smt ITA 2015	LKTD TA 2015	LKTD Smt ITA 2016
KB DBH Iuran Terap TA 2012	99.127.647.326	99.127.647.326	47.814.476.737	31.921.890.153	31.921.890.153	31.921.890.153	31.921.890.153	31.921.890.153
KB DBH Royalti TA 2012	1.207.398.064.643	1.207.398.064.643	167.381.918.130	143.654.058.501	143.654.058.501	143.654.058.501	143.654.058.501	143.654.058.501
KB DBH Dana Reboisasi TA 2012	111.345.008.339	111.345.008.339	8.389.931.929	8.083.283.861	8.083.283.861	8.083.283.861	8.083.283.861	8.083.283.861
KB DBH PSDH TA 2012	11.353.749.723	11.353.749.723	6.940.589.264	6.717.095.601	6.717.095.601	6.717.095.601	6.717.095.601	6.717.095.601
KB DBH IUPH/IHPH TA 2012	23.006.758.360	23.006.758.360	6.565.243.360	4.801.243.360	4.801.243.360	4.801.243.360	4.801.243.360	4.801.243.360
KB DBH Perikanan TA 2012	589.624.560	589.624.560	-	-	-	-	-	-
KB DBH Pertum TA 2013	-	-	3.148.050.620.218	171.728.271.596	171.728.271.596	171.728.271.596	171.728.271.596	171.728.271.596
KB DBH Royalti TA 2014	-	-	-	307.435.693	307.435.693	307.435.693	-	-
KB DBH Kehutanan TA 2013	-	-	43.001.424.967	103.750.943.250	103.750.943.250	103.750.943.250	103.750.943.250	103.750.943.250
KB DBH IUPH TA 2014	-	-	-	29.259.004.509	-	-	-	-
Beban DBH Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-	756.183.099.493	756.183.099.493
Beban DBH Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	4.879.437.772.392	4.879.437.772.392
Beban DBH Pertum Iuran Terap	-	-	-	-	-	-	329.548.032.807	329.548.032.807
Beban DBH Kehutanan PSDH	-	-	-	-	-	-	424.549.849.818	424.549.849.818
Beban DBH Kehutanan DR	-	-	-	-	-	-	347.603.965.853	347.603.965.853
Beban DBH Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	380.808.890.982	380.808.890.982
KB DBH Paduri (Iuran Terap) TA 2014	-	-	-	7.873.271.179	-	-	-	-
KB DBH Paduri (Eksisting) TA 2014	-	-	-	148.092.521.286	-	-	-	-
TOTAL	1.452.820.852.951	1.452.820.852.951	3.428.144.204.605	402.078.429.545	656.189.024.989	470.964.222.015	7.588.788.397.668	7.588.788.397.668